

**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN GUNA
MENINGKATKAN KEMAMPUAN TEMPUR PRAJURIT TNI AL
DALAM RANGKA Mendukung PELAKSANAAN TUGAS POKOK
KOMANDO ARMADA RI KAWASAN TIMUR
(Studi Di Satuan Kapal Amfibi)**

Widodo

Komanadan Kobangdikal Surabaya

Email: widodo aspilan@yahoo.com

ABSTRACT

The aim of this was to described the combat capability that can be achieved by the Soldiers of the Navy, training events that had been implemented to enhanced the combat capability of Navy Soldiers, and efforted to optimized the implementation of training to improved the combat capability of the Navy in Amphibious Ship Unit Soldiers Koarmatim.

Based on the objectives to be achieved, so the research applied the naturalistic qualitative approach by using data collection method which involved: participant observation, in-depth interviews and document search. Technical Data analysis using qualitative descriptive techniques through three lanes of activities, include; reduction, data display and conclusion.

The obtained findings could be described as followed. First, Mastery of navy soldier combat capability of Eastern Fleet Command Amphibious Warship Unit Koarmatim demonstrated achievement of combat capability with sufficient skilled category. Second, The refinement of pattern, method and training organization . Third, in the implementation of training, there were still barriers.

Keywords: *Optimization, Training Implementation, Combat Capability.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang kemampuan tempur yang dapat dicapai oleh Prajurit TNI AL, penyelenggaraan pelatihan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan tempur Prajurit TNI AL, dan upaya optimalisasi penyelenggaraan pelatihan guna meningkatkan kemampuan tempur Prajurit TNI AL di Satuan Kapal Amfibi Koarmatim.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian menggunakan pendekatan naturalistik kualitatif, dengan metode pengumpulan data, meliputi: observasi partisipan, wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tiga alur kegiatan, meliputi; reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil temuan penelitian yang diperoleh dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, Penguasaan kemampuan tempur Prajurit TNI AL Satuan Kapal Amfibi Koarmatim menunjukkan pencapaian kemampuan tempur dengan kategori yang cukup terampil. Kedua, Perlunya penyempurnaan pola, metode dan pengorganisasian pelatihan Ketiga, Dalam penyelenggaraan pelatihan masih terdapat hambatan,

Kata Kunci: *Optimalisasi, Penyelenggaraan Pelatihan, Kemampuan Tempur.*

PENGANTAR

Di era globalisasi TNI AL dihadapkan pada medan tugas yang sedemikian berat, dengan tingkat resiko yang tinggi, permasalahan dan tantangan yang sangat kompleks, oleh karena itu TNI AL dituntut untuk terus meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya. Dalam rangka mencapai kekuatan pertahanan matra laut yang handal dan disegani, maka perlu didukung dengan kemampuan prajurit TNI AL yang profesional di bidangnya. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalisme prajurit TNI AL adalah melalui penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan secara terprogram, bertahap dan berkelanjutan.

Pada masa damai, Koarmatim khususnya Satuan Kapal Amfibi banyak melaksanakan kegiatan operasi keamanan laut dan aktifitas latihan tempur lainnya guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan tempur prajurit TNI AL. Dalam berbagai aktivitas operasi dan latihan yang telah dilaksanakan selama ini, banyak Komandan KRI di lingkungan Satuan Kapal Amfibi Koarmatim yang mengeluhkan tentang kurangnya kemampuan tempur yang dimiliki para prajuritnya. Ditemukan pula bahwa penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan tempur prajurit TNI AL di Satuan Kapal Amfibi selama ini masih menekankan pada penguasaan *hard skill* dari pada *soft skill*.

Beberapa hal tersebut menjadikan peneliti ingin mengkaji lebih mendalam tentang optimalisasi penyelenggaraan pelatihan guna meningkatkan kemampuan tempur prajurit TNI AL di Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim). Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan sebagian

permasalahan yang ada di Koarmatim, dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemimpin TNI Angkatan Laut dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut guna meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL.

PEMBAHASAN

Profil Satuan Kapal Amfibi Koarmatim

Satuan Kapal Amfibi Koarmatim merupakan komando pelaksana pembinaan yang berkedudukan langsung di bawah Pangarmatim. Sebagai bagian dari Koarmatim, Satuan Kapal Amfibi Koarmatim memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur unsur-unsur organiknya dalam bidang peperangan amfibi, sistem muat taktis dan muat administratif dalam rangka meningkatkan kemampuan tempur Koarmatim. Tugas pokok yang diemban tersebut mengacu pada tugas pokok TNI sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP)(UU No 34,2004) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Satuan Kapal Amfibi sebagai salah satu satuan kerja operasional tempur di Koarmatim yang mendukung kegiatan operasi amfibi, memiliki 15 KRI dari berbagai jenis atau kelas seperti tipe *Tacoma* yang merupakan kapalkapal buatan Korea, kelas *Frosch I* tipe 108 dan *Frosch II* tipe 109 yang merupakan bagian dari pembelian 39 kapal Jerman Timur dan kapal multi-tugas atau kapal *Landing Platform Dock* (LPD) yang berasal dari Korea Selatan dan PT. PAL, serta kapal komando guna mendukung pelaksanaan tugas operasi tempur dalam peperangan amfibi.

Kemampuan Tempur Prajurit TNI AL Satfibr Koarmatim

Penguasaan kemampuan tempur prajurit TNI AL Satuan Kapal Amfibi dalam tiga tingkatan, meliputi: penguasaan kemampuan tempur tingkat 1 (L1), penguasaan kemampuan tempur tingkat 2 (L-2), dan penguasaan kemampuan tempur tingkat 3 (L-3). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kolatarmatim dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2013 yang melibatkan 5 KRI di lingkungan Satuan Kapal Amfibi, terdiri dari: KRI Teluk Mandar (TMR)-514, KRI Teluk Ende (TLE), KRI Makasar (MKS)- 590, KRI Teluk Jakarta (TJA)-541 dan KRI Teluk Sangkulirang (TSR)-542, diperoleh capaian kemampuan tempur Prajurit TNI AL yang masih cukup terampil. Penilaian tersebut sesuai dengan apa yang telah dilaporkan oleh Komando Latihan Armada RI Kawasan Timur (Kolatarmatim) selaku lembaga penilai dan disetujui oleh para *stakeholder* terkait.

Namun demikian, secara umum para *stakeholder* masih merasa belum cukup puas dengan kemampuan tempur yang telah dicapai oleh Prajurit TNI AL Satuan Kapal Amfibi dalam setiap latihan. Para *stakeholder* menyatakan masih terdapat beberapa kekurangan kemampuan tempur Prajurit TNI AL Satfibr yang perlu ditingkatkan, meliputi: koordinasi yang kurang maksimal antar bagian, belum optimalnya produktivitas kerja ABK, kurangnya keterampilan Prajurit TNI AL dalam memperbaiki peralatan dan pesawat kapal yang rusak, masih dijumpai Prajurit TNI AL yang mengabaikan actor keselamatan dan prosedur kerja.

Penyelenggaraan Pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan prajurit TNI AL di Satuan Kapal Amfibi Koarmatim

meliputi: pola pelatihan, metode pelatihan, dan pengorganisasian pelatihan.

Pertama, pola pelatihan. Pola pelatihan dibagi atas 3 jenis latihan sesuai tahapan latihan pada Geladi Tugas Tempur Tingkat 1 (L-1), Geladi Tugas Tempur Tingkat 2 (L-2) dan Geladi Tugas Tempur Tingkat 3 (L-3). Ketiga jenis pelatihan tersebut harus dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan (*longitudinal*). Dalam tahapan pelatihan tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah sasaran latihan, struktur kurikulum dan lama waktu latihan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada Geladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat 1, 2 dan 3, sasaran latihan, struktur kurikulum dan lama waktu latihan perlu direvisi sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan organisasi.

Kedua, metode pelatihan. Mustaji (2010) memaknai metode sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Bandono (2010) mengemukakan konsep metode pelatihan identik dengan konsep metode pembelajaran, karena pelatihan adalah bagian dari bidang garapan teknologi pendidikan. Muhibbin Syah (1995) mengatakan metode pembelajaran ialah cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan kependidikan khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada siswa. Dalam Buku Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Geladi Tugas Tempur Kapal Satuan Amfibi yang disahkan berdasarkan Skep Kasal Nomor Skep/3243/VII/ 1989 tanggal 18 Juli 1989 telah diatur jenis-jenis metode pelatihan yang dapat diterapkan, seperti: ceramah, drill pos tempur, latihan kering, demonstrasi yang banyak diterapkan

pada saat L-1, latihan basah/ praktek lapangan dan briefing sebelum latihan yang diterapkan pada saat L-2, latihan posko dalam bentuk latihan peta dan latihan lapangan di laut serta pantai pendaratan yang diterapkan pada saat L-3. Mengenai metode pelatihan mana yang lebih efektif, efisien dan memiliki daya tarik semua narasumber sepakat bahwa metode pelatihan yang telah diterapkan sudah cukup bervariasi dan pemahaman para pelaku pelatihan tentang metode pelatihan sangat tinggi (Skep Kasal, 1989).

Ketiga, pengorganisasian pelatihan. Pengorganisasian terkait dengan penataan organisasi yang menyelenggarakan pelatihan agar pelatihan dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan penyelenggaraan pelatihan kemampuan tempur prajurit TNI AL, maka pengorganisasian pelatihan mengikuti ketentuan yang ada dalam Buku Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Geladi Tugas Tempur Kapal Satuan Amfibi yang disahkan berdasarkan Skep Kasal Nomor Skep/ 3243/VII/1989 tanggal 18 Juli 1989 dan belum perlu direvisi karena masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan (Skep.Kasal, 1989).

Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pelatihan

Hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pelatihan terdiri dari: ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, teknologi dan sistem kesenjataan, serta sarana dan prasarana;

Pertama, ketersediaan anggaran. Dalam rangka mencapai kekuatan pertahanan matra laut yang handal dan disegani tentu harus didukung dengan kemampuan tempur Prajurit TNIAL yang berkualitas, sebagai indikator dari profesionalisme. Peningkatan profesionalisme

melalui upaya pelatihan harus dilakukan melalui suatu penyelenggaraan pelatihan yang terencana, bertahap, berkesinambungan, dan terukur. Penyelenggaraan pelatihan tersebut membutuhkan banyak anggaran. Kondisi saat ini dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut, TNI Angkatan Laut mendapatkan alokasi anggaran yang sangat minim. Minimnya anggaran untuk peningkatan profesionalisme prajurit matra laut tersebut setidaknya tidak terlepas dari kebijakan Kementerian pertahanan yang masih memprioritaskan untuk mempercepat realisasi *Minimum Essential Force* (MEF) dengan melaksanakan pengadaan dan modernisasi alutsista serta memenuhi kebutuhan belanja pegawai, seperti membayar gaji dan tunjangan. Dengan demikian program untuk peningkatan profesionalisme prajurit pun menjadi terbatas.

Kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau *human resources* merupakan modal dasar dan aset utama bagi pengembangan suatu organisasi, tidak terkecuali dengan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut khususnya di Koarmatim. SDM memiliki karakteristik yang dinamis dan dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang bernilai strategis. Agar dinamika perkembangannya menunjukkan arah yang lebih baik maka SDM perlu dibina melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara berjenjang, bertahap, dan berkelanjutan. Kondisi SDM di Satuan Kapal Amfibi dihadapkan pada jumlah personel yang terbatas. Kondisi terbatasnya personel di Satuan Kapal Amfibi harus segera dipenuhi agar tenaga kerjanya dapat didayagunakan untuk meningkatkan produktivitas kinerja.

Peningkatan produktivitas kinerja akan mengarahkan pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal.

Ketiga, teknologi dan sistem kesenjataan. Kondisi teknologi dan sistem kesenjataan alutsista di Satuan Kapal Amfibi usia pakainya sudah cukup tua. Dari 15 KRI yang dimiliki hanya 2 KRI berusia pakai kurang dari sepuluh tahun sedangkan sisanya atau 13 KRI sudah berusia pakai di atas 30 tahun. Usia pakai KRI yang relatif tua tentu menjadi kendala tersendiri bagi prajurit dalam menguasai kemampuan tempur yang diharapkan. Kondisi alutsista ditinjau dari aspek teknologi dan kemampuan tempur adalah semakin menurun, sehingga jika dihadapkan pada kompleksitas tuntutan tugas dan luas wilayah yang harus dijaga, baik kuantitas maupun kualitas, maka tetap diperlukan upaya peningkatan kemampuan alutsista yang dibangun dari anggaran yang terbatas. Peningkatan kemampuan alutsista akan memiliki dampak penangkalan yang besar terhadap ancaman dan gangguan di wilayah kedaulatan NKRI.

Keempat, sarana dan prasarana. Secara umum sarana dan prasarana pendidikan dan latihan yang dimiliki oleh Koarmatim sebagai penyelenggara pelatihan yang terdiri dari: gedung, ruang kelas, laboratorium, simulator, dan media pelatihan masih cukup memadai, sedangkan sarana dan prasarana yang berupa material latihan masih sangat terbatas. Material latihan terkait dengan material yang dibutuhkan saat KRI dioperasikan.

Optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan

Optimalisasi penyelenggaraan pelatihan prajurit TNI AL di Satuan Kapal Amfibi Koarmatim dilakukan melalui usaha-usaha sebagai berikut:

Pertama, kebijakan dan strategi optimalisasi penyelenggaraan pelatihan prajurit TNI AL. Optimalisasi penyelenggaraan pelatihan guna meningkatkan kemampuan tempur Prajurit TNI AL di Satuan Kapal Amfibi Koarmatim dapat ditempuh melalui penetapan kebijakan “Terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan pelatihan guna meningkatkan kemampuan tempur Prajurit TNI AL melalui penyempurnaan pola, metode dan pengorganisasian pelatihan, pengelolaan anggaran pelatihan, pembinaan SDM, pengembangan teknologi dan sistem kesenjataan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana”. Dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan penetapan strategi, sebagai berikut: 1) Strategi 1. Penyempurnaan pola, metode dan pengorganisasian pelatihan melalui revisi Buku Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Geladi Tugas Tempur Kapal Satuan Amfibi yang disahkan berdasarkan Skep Kasal Nomor Skep/3243/VII/1989 tanggal 18 Juli 1989. 2) Strategi 2. Pengelolaan anggaran pelatihan yang efektif dan efisien melalui perencanaan dan pengelolaan anggaran berbagai program kegiatan yang mendukung peningkatan kemampuan tempur prajurit TNI AL. 3) Strategi 3. Pembinaan SDM melalui pemenuhan DSP dan peningkatan kompetensi SDM. 4) Strategi 4. Pengembangan teknologi dan sistem kesenjataan melalui pengadaan alutsista modern dan mendukung industri strategis pertahanan nasional dalam memproduksi kapal-kapal jenis LPD, LST dan Frosch. 5) Strategi 5. Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan pelatihan melalui penambahan sarana dan prasarana berupa material latihan yang dapat dioperasikan secara efektif dan efisien.

Kedua, penyempurnaan pola, metode dan pengorganisasian pelatihan. Penyempurnaan

pola, metode dan pengorganisasian pelatihan dapat dilaksanakan melalui upaya merevisi Buku Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Geladi Tugas Tempur Kapal Satuan Amfibi yang disahkan berdasarkan Skep Kasal Nomor Skep/3243/VII/1989 tanggal 18 Juli 1989 agar sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi terkini. Namun demikian isi materi tidak perlu direvisi secara keseluruhan karena sebagian materinya masih cukup relevan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi saat ini.

Ketiga, upaya pengelolaan anggaran pelatihan. Meskipun dihadapkan pada anggaran yang masih minim, tuntutan penyelenggaraan pelatihan yang ideal harus tetap diupayakan, sehingga kompetensi prajurit TNI AL yang dipersyaratkan dapat tercapai secara optimal. Penyelenggaraan latihan pada prinsipnya dapat dialokasikan tersendiri secara khusus maupun diintegrasikan dalam kegiatan lain baik pada saat melaksanakan operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Dengan demikian, meskipun mengalami keterbatasan anggaran, kemampuan tempur Prajurit TNI AL senantiasa dapat terjaga dan terbina dengan baik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi TNI Angkatan Laut.

Keempat, upaya pembinaan sumber daya manusia. Kondisi saat ini yang terjadi di Satuan Kapal Amfibi Koarmatim, pemenuhan personel staf maupun prajurit TNI AL masih belum ideal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kebutuhan akan jumlah dan kualifikasi personel yang ideal sesuai dengan kriteria Daftar Susunan Personel (DSP) belum dapat dipenuhi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi keterbatasan jumlah dan kompetensi personel adalah: 1) Koarmatim mengajukan usulan kepada Kepala Staf Angkatan Laut dalam

hal ini melalui Asisten Personel Kasal untuk pemenuhan jumlah dan kualifikasi personel sesuai dengan DSP berdasarkan kebutuhan organisasi dan prosedur yang telah ditetapkan. 2) Koarmatim melaksanakan penataan secara internal terkait dengan penempatan jabatan personel (*tour of duty*) yang disesuaikan dengan kualifikasi, bakat dan minat prajurit. 3) Koarmatim dapat bekerjasama dengan satuan samping seperti Kobangdikal dalam meningkatkan standar kualifikasi kemampuan tempur prajurit TNI AL. 4) Koarmatim perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan anggotanya sesuai dengan profesi korps yang dimilikinya melalui pelatihan yang bersifat teknis, yang mampu mendukung pemeliharaan dan perawatan KRI.

Kelima, upaya pengembangan teknologi dan sistem kesenjataan. Sebagian besar teknologi dan sistem kesenjataan kapal-kapal di Satuan Kapal Amfibi Koarmatim telah berusia tua. Seiring dengan komitmen pemerintah untuk membangun alutsista matra laut termasuk alutsista yang terkait dengan kapal-kapal yang dibutuhkan di Satuan Kapal Amfibi, diperlukan beberapa upaya sebagai berikut: 1) Koarmatim sebagai bagian dari organisasi TNI Angkatan Laut perlu ikut mendukung sepenuhnya program ToT (*Transfer of Technology*) yang dicanangkan oleh pemerintah dengan melibatkan sinergitas dari berbagai komponen bangsa, seperti: TNI AL, perguruan tinggi, industri strategis pertahanan dalam negeri (PT PAL, PT LEN, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dll), Kementerian Pertahanan, Kementerian Ristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan LAPAN serta sinergitas kerjasama antar bangsa seperti dengan negara Korea, Amerika, Belanda, Jerman, dan lain-lain.

2) Koarmatim harus terus menekankan kepada satuan-satuan yang ada di bawahnya untuk melaksanakan pemeliharaan secara maksimal terhadap alutsista yang dimiliki dengan memaksimalkan sistem Jadwal Olah Pemeliharaan (JOP) dan Jadwal Olah Gerak (JOG) KRI secara proporsional.

Keenam, upaya peningkatan sarana dan prasarana pelatihan. Sarana dan prasarana yang ada di KRI untuk keperluan pelatihan peningkatan kemampuan tempur prajurit TNI AL, masih sangat terbatas utamanya yang terkait dengan material latihan. Upaya peningkatan sarana dan prasarana dapat dilakukan, melalui: 1) Koarmatim perlu mengajukan pemenuhan sarana dan prasarana utamanya material pelatihan yang mampu mendukung pengembangan kemampuan tempur Prajurit TNI AL, berupa penyusunan proyek pengadaan material pelatihan yang baru dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan iptek. 2) Kolatarmatim maupun Satuan Kapal Amfibi di lingkungan Koarmatim perlu mengembangkan perpustakaan digital (*e-library*). 3) Dalam rangka mengatasi keterbatasan sarana prasarana, Koarmatim perlu menjalin kerjasama dengan Kobangdikal, khususnya untuk pelatihan yang tidak mampu dilaksanakan secara mandiri oleh Koarmatim.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan data hasil temuan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, penguasaan kemampuan tempur prajurit TNI AL di Satuan Kapal Amfibi Koarmatim menunjukkan pencapaian kemampuan tempur yang masih cukup terampil. Namun demikian masih terdapat item-item kemampuan tempur yang perlu ditingkatkan, meliputi: kemampuan berkoordinasi antar

bagian, produktivitas kerja Prajurit TNI AL, keterampilan prajurit TNI AL dalam memperbaiki peralatan dan pesawat kapal yang rusak, dan pemahaman prajurit TNI AL tentang faktor keselamatan dan prosedur kerja.

Kedua, penyempurnaan pola, metode dan pengorganisasian pelatihan dapat dilakukan melalui revisi Buku Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Geladi Tugas Tempur Kapal Satuan Amfibi yang disahkan berdasarkan Skep Kasal Nomor Skep/ 3243/VII/1989 tanggal 18 Juli 1989, namun demikian tidak keseluruhan materi dalam buku petunjuk yang direvisi.

Ketiga, dalam penyelenggaraan pelatihan terdapat hambatan-hambatan, meliputi: anggaran pelatihan yang terbatas, jumlah dan kualitas SDM yang terbatas, teknologi dan sistem kesenjataan yang berusia tua, serta sarana prasarana yang belum memadai. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui: pengelolaan anggaran pelatihan yang efektif dan efisien melalui pengajuan berbagai program kegiatan yang mendukung peningkatan kemampuan tempur Prajurit TNI AL, pembinaan SDM melalui pemenuhan Daftar Susunan Personel yang ideal dan peningkatan kompetensi SDM, pengembangan teknologi dan sistem kesenjataan melalui pengadaan alutsista moderen dan mendukung industri strategis pertahanan nasional dalam memproduksi alutsista kapalkapal jenis LPD, LST dan Frosch, peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan pelatihan melalui penambahan sarana dan prasarana utamanya material latihan yang terkait dan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Bandono, A., 2010, Pengembangan Model Pembelajaran Naval Collaboration Flexible Learning (NCFL) Aplikasi

pada Bidang Studi Psikologi Massa di Akademi Angkatan Laut, *Disertasi: Universitas Negeri Malang.*

Mustaji, 2010, *Pengelolaan Pelatihan, Upaya Peningkatan Kinerja Dalam Bidang Bisnis dan Pendidikan.* Surabaya: Unesa Press.

Syah, M., 1995, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru,* Bandung: Rosdakarya

Undang-Undang & Surat Keputusan:

Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/3243/VII/1989 tanggal 18 Juli 1989 tentang Buku Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Geladi Tugas Tempur Kapal Satuan Amfibi.